



Perempuan Batak Toba dan Misi: Tinjauan Misi Praksis terhadap Posisi Pendeta Perempuan dalam Kepemimpinan di Gereja HKBP

Toba Batak Women and Mission: A Practical Mission Review of the Role of Female Pastors in Leadership within the HKBP Church

Marta Uli Batubara
martaulibatubara84@gmail.com
Universitas Kristen Duta Wacana

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis posisi perempuan Batak Toba dalam kepemimpinan pastoral di gereja HKBP. Saya berpendapat bahwa setiap diskusi tentang perempuan Batak Toba tidak dapat dipisahkan dari konsep *habatahon*, yang membentuk norma sosial dan tradisi. Budaya masyarakat Batak Toba masih sangat patriarkal, di mana perempuan menempati posisi subordinat dalam berbagai aspek kehidupan budaya. Hal ini terlihat dari proses panjang untuk mengintegrasikan pendeta perempuan ke dalam gereja HKBP. Oleh karena itu, saya mengeksplorasi peran pendeta perempuan sebagai isu penting dalam hierarki organisasi HKBP. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada amandemen Peraturan HKBP pada tahun 2002 (Amandemen III), pendeta perempuan masih menghadapi keterbatasan peluang untuk terlibat dalam peran kepemimpinan di gereja.

Kata-kata kunci: misi, pendeta, perempuan, posisi, kepemimpinan, HKBP.

Abstract

This article seeks to critically examine the position of Toba Batak women in pastoral leadership within the HKBP church. I argue that any discussion of Toba Batak women is inherently tied to the concept of *habatahon*, which shapes social norms and traditions. The culture of the Toba Batak people remains deeply patriarchal, with women occupying a subordinate position across various aspects of cultural life. This is evident in the lengthy process of integrating female pastors into the HKBP church. Consequently, I explore the role of female pastors as a key issue in the organizational hierarchy of the HKBP. The research employs a descriptive qualitative approach, utilizing literature reviews and interviews as data collection

methods. The findings reveal that, despite the 2002 amendments to the HKBP Regulations (Amendment III), female pastors still face limited opportunities to engage in leadership roles within the church.

Keywords: mission, pastor, women, position, leadership, HKBP

Pendahuluan

Berbicara mengenai perempuan Batak Toba tidak lepas dari kehidupan *habatahon* yang memengaruhi nilai-nilai sosial serta adat istiadat yang bersifat mengikat terlebih dalam pada saat sebelum kekristenan datang. Kebudayaan masyarakat Batak Toba tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarki yang hampir mencakup seluruh aktivitas masyarakat Batak Toba, baik itu dalam keluarga, dalam adat, maupun dalam interaksinya dengan kehidupan sosial di sekitarnya. Dengan demikian, dalam kebudayaan Batak Toba, perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak setara ataupun tindakan yang semena-mena terlebih mengenai konstruksi gender sehingga perempuan sulit untuk mendapatkan haknya. Dengan perkataan lain, perempuan dinomorduakan dalam segala aspek yang merujuk kepada peran domestik.

Perbedaan gender, feminin dan maskulin, melibatkan upaya budaya tertentu. Sherry Ortner secara persuasif berpendapat bahwa budaya adalah wilayah laki-laki, sedangkan perempuan dibatasi pada alam.¹ Bukan saja laki-laki dan perempuan berbeda, tetapi laki-laki sering kali dianggap lebih baik. Laki-laki menjadikan perempuan sebagai “Yang Lain” dan memberi nilai negatif pada hal lain. Dalam berbagai cara, dunia Yunani-Romawi menyampaikan “kebenaran alami” tersebut dalam sastra, adat istiadat sosial, praktik hukum, dan ritual keagamaan. Paulus berenang di laut yang sama – seperti yang dilakukan gereja-gerejanya. Mereka memandang dunia melalui konstruksi gender yang meminimalkan partisipasi perempuan dalam budaya (kehidupan publik) dan menurunkan nilai kehidupan pribadi sebagai ranah perempuan.²

Fenomena yang dijelaskan di atas mengakibatkan perempuan dianggap kurang cocok sebagai pemimpin terlebih sebagai pemimpin atau pendeta. Hal

1 Sherry Ortner, “Is Nature to Culture as Female is to Male?,” dalam *Woman, Culture, and Society*, ed. oleh Michelle Rosaldo dan Louise Lamphere (Stanford: Stanford University Press, 1974), 67–88.

2 Lynn H. Cohick, “Prophecy, Women in Leadership and the Body of Christ,” dalam *Women, Ministry, and the Gospel: Exploring New Paradigms*, ed. oleh Mark Husbands dan Timothy Larsen (Illinois: Inter-Varsity Press, 2007), 83.

ini juga dikaitkan dengan kewajiban perempuan sebagai ibu dan istri. Selain itu, seorang perempuan juga harus melayani laki-laki, mengakibatkan laki-laki memiliki kuasa penuh terhadap perempuan. Kepemimpinan kaum perempuan di gereja dianggap sebagai bentuk dari pemberontakan terhadap tatanan sosial budaya yang berlaku dalam kebudayaan Batak Toba.

Proses penerimaan pendeta perempuan di tengah gereja mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Kedatangan misionaris membawa perubahan besar bagi orang Batak terkhusus perempuan baik dalam bidang penginjilan, pendidikan, maupun spiritualitas. Menurut Aturan dan Peraturan (AP) HKBP 2002 setelah Amandemen III, perempuan diberikan peluang dan kesempatan untuk berperan aktif dalam melayani di HKBP. Namun, meskipun telah terjadi perubahan dalam AP, realitanya, pendeta perempuan kurang mendapatkan kedudukan ataupun kesempatan untuk berkarya di tengah gereja. Dalam gereja masih terdapat perbedaan peran dalam kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan-kebijakan organisasi yang masih bersifat diskriminasi dalam jemaat menimbulkan adanya penolakan penempatan pendeta perempuan yang dianggap tidak mampu dalam memimpin dan disangkutkan dengan tugas domestik sebagai ibu rumah tangga. Pendeta perempuan juga dihadirkan untuk membina jemaat serta menjalankan misi gereja yaitu memberitakan injil serta melayani jemaat.

Posisi Perempuan dalam Batak Toba

Sebelum Injil Kristus masuk ke suku Batak, masyarakat Batak masih berada dalam ketertinggalan dalam hal pendidikan, kesehatan, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat lainnya.³ Terlebih kepada kaum perempuan Batak yang mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam berbagai aspek. Kehidupan perempuan Batak dikendalikan oleh laki-laki atau suaminya sehingga perempuan sangat terikat dan tidak bebas dalam mengekspresikan dirinya. Perempuan Batak tidak memiliki kuasa, hak, posisi, status, dan sebagainya.

Pola kehidupan orang Batak dalam sudut pandangan ekonomi tidak terlepas dalam pola kehidupan yang bersifat agraris yang menjadi kebutuhan dasar sehari-hari. Orang Batak sangat identik dengan tanah sebagai faktor produksi dan dikelola oleh keluarga yang bersangkutan. Pada hakikatnya, masyarakat Batak mempunyai pembagian kerja yang berkaitan dengan

3 Darwin Lumbantobing, *Tumbuh Lokal Berbuah Universal: Revitalisasi Program Pelayanan HKBP Pasca 100 Tahun Dr. Ingwer Ludwig Nommensen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 467.

pembagian peranan laki-laki dan perempuan. Sistem pembagian pekerjaan laki-laki merujuk kepada pekerjaan di Sawah dan biasanya letak berada di luar perkampungan sedangkan perempuan mengerjakan di desa seperti bertenun, memasak, dan mengasuh anak. Dalam pembagian sistem kerja ini, seorang perempuan disebut dengan *pardihuta* dan *pardijabu* sedangkan laki-laki disebut *pardibalian*.⁴

Berbicara mengenai kedudukan perempuan Batak, itu merujuk kepada derajat bahwasannya derajat laki-laki lebih tinggi atau unggul dibandingkan perempuan. Perempuan dianggap sebagai budak dan tidak memiliki hak dalam mengambil keputusan dan warisan. Perempuan Batak mendapatkan istilah perempuan *dituhor* (perempuan dibeli) sehingga perempuan harus menghilangkan identitasnya dalam kuasa. Budaya Batak mengharuskan perempuan untuk menikah pada usia 15-20 tahun, biasanya orang tua mendorong anak perempuannya untuk menentukan pilihannya atau ditentukan oleh orang tuanya.⁵ Oleh karena itu, kehidupan perempuan Batak sebelum kekristenan mengikat perempuan sehingga tidak bebas dalam berkarya ataupun berekspresi. Seolah-olah, masa depan perempuan dikendalikan oleh orang lain, terutama laki-laki.

Berbicara mengenai kepemimpinan bahwasannya kepemimpinan laki-laki dalam budaya Batak lebih unggul dibandingkan perempuan. Kedudukan perempuan dalam kebudayaan Batak Toba berakar dalam sistem kekerabatan patrilineal dengan adanya hubungan triadik yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu*.⁶ Hal ini dapat berpengaruh kepada posisi kepemimpinan perempuan Batak dalam suatu adat Batak. Posisi perempuan dalam budaya Batak tergolong lemah dan tidak setara dengan laki-laki. Perempuan yang ideal adalah perempuan yang patuh serta tunduk terhadap laki-laki baik itu kepada ayah, suami, saudara laki-laki, dan lainnya.⁷ Hal itulah yang menjadi kultus dalam pandangan hidup masyarakat Batak dan jika seorang perempuan melakukan di luar itu, ia dianggap telah melakukan penyimpangan. Terdapat dalil bahwa manusia sejati adalah laki-laki. Hal ini yang menyebabkan kecenderungan dalam menilai perempuan dari sudut pandang laki-laki sehingga

4 Harisan Boni Firmando, *Sosiologi Kebudayaan dari Nilai Budaya hingga Praktik Sosial* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 129.

5 Riris Johanna Siagian, *Satu Visi Menuju HKBP yang Baru: Penelitian dan Analisa Historis-Kritis, Naratif dari Perspektif Perempuan* (Pematangsiantar: Percetakan HKBP, 2001), 3.

6 Sulistyowati Irianto, *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 8.

7 Yessy, *Perempuan Kristiani Indonesia Berteologi dalam Konteks* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 116.

perempuan dipandang sebagai pelengkap. Pada masa sebelum kekristenan, kepemimpinan perempuan Batak tidak ada yang memiliki gelar dan jabatan yang formal. Namun, banyak perempuan Batak yang memengaruhi suatu kelompok di perkampungan atau tempat tinggal. Salah satu tokoh perempuan berpendidikan yaitu Sibaso yang merupakan dukun perempuan Batak (*datu ina*). Sibaso menerima murid untuk belajar dan tinggal di rumah hingga waktu belajarnya selesai. Sibaso sebagai tokoh yang memegang jabatan pemimpin atau dikenal sebagai imam (pemimpin ritual) yang bertugas sebagai perantara dalam ritual.⁸

Kebudayaan Batak menerapkan sistem patriarki sebagai menyanggah hak dan kewajiban yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan.⁹ Istilah patriarki ini digunakan untuk menyebutkan suatu jenis “keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki,” yaitu rumah tangga besar patriarki yang terdiri dari kaum perempuan, perempuan muda, anak-anak, budak, dan pelayan rumah tangga yang berada di bawah kekuasaan laki-laki.¹⁰ Oleh karena itu, perempuan terikat dan tidak bebas dalam mengekspresikan diri. Respons perempuan cenderung dengan diam. Pandangan tradisional terkait patriarki berkaitan dengan kondisi biologis. Kondisi biologis ini dijadikan sebagai alasan dalam dominasi budaya patriarki. Kondisi biologis antara laki-laki dan perempuan berbeda karena pada hakikatnya perempuan adalah istimewa karena dapat mengandung, melahirkan, dan menyusui.

Dalam praktik adat istiadat, orang Batak menerapkan sistem *Dalihan Na Tolu*. Secara harfiah *Dalihan* adalah tunggu sedangkan *Na Tolu* adalah tiga buah batu yang dijadikan sebagai tempat masak.¹¹ Dalam upacara adat Batak terdapat tiga tunggu atau dikenal sebagai peran yang terdiri dari *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Perempuan dalam bahasa Batak disebut *boru* dan salah satu posisi dalam *dalihan Na Tolu* adalah *boru*. *Hula-hula* menempatkan posisi yang terhormat dalam silsilah adat Batak. *Dongan Tubu* sekelompok kerabat saudara laki-laki berdasarkan garis keturunan bapak. *Boru* pihak yang menerima sehingga *boru* harus memiliki sikap hormat kepada *hula-hula*. Posisi *boru* menempatkan paling bawah atau disebut dengan *parhobas*.¹²

8 Riris Johanna Siagian, “Sahala Kepemimpinan Perempuan dalam Konteks Masyarakat Batak dan Alkitab,” *VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 1 (2019): 128.

9 Irianto, *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum*, 9.

10 Jerda Djawa, “Perjuangan Perempuan di tengah Budaya Patriarki dalam Perjanjian Lama,” dalam *Ketika Perempuan Berteologi*, ed. oleh Asnath Niwa Natar (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2012), 25.

11 Mangihut Siregar, “Ketidaksetaraan Gender dalam Dalihan na Tolu,” *An1mage: Jurnal Studi Kultural* 3, no. 1 (2018): 13–15.

12 Elizabeth Nela Sari, Muhammad Yamin, dan Edy Ikhsan, “Peran Dalihan Natolu dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat untuk Pengadaan Kepentingan

Ditinjau dari sudut pandang kesetaraan gender, terjadi ketidakadilan terhadap perempuan. Hal ini terlihat dari sistem kedudukan laki-laki sebagai kelas utama sedangkan perempuan sebagai pelengkap dan objek. Kedudukan perempuan dicap sebagai kelas kedua, yang artinya kekuasaan laki-laki bersifat hegemoni sehingga perempuan Batak hanya menerima perintah, penentu, ataupun keputusan dari laki-laki.¹³

Kaum feminis percaya bahwa ungkapan “baik laki-laki maupun perempuan” menghapuskan semua perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam komunitas Kristen.¹⁴ Salah satu suara utama yang mendukung penghapusan perbedaan peran berpendapat bahwa rasul Paulus menyampaikan dua poin dalam Galatia 3:28: (1) Dia sedang membalikkan tatanan penciptaan, membentuk tatanan penebusan yang baru; (2) Kategori Yahudi-kafir, budak-merdeka, dan laki-laki-perempuan fungsional, bukan sekadar posisional. Sten-dahl menulis, “Sama seperti orang-orang Yahudi dan Yunani tetap sama, demikian pula laki-laki dan perempuan tetap sama; tetapi di dalam Kristus, melalui baptisan dan karenanya di dalam gereja – bukan hanya karena iman, sesuatu telah terjadi yang melampaui Hukum itu sendiri dan dengan demikian bahkan urutan penciptaan.”¹⁵

Secara kultural, konseptualisasi Batak mengenai anak merujuk pada hanya laki-laki bukan perempuan.¹⁶ Dampak dari hubungan kekuasaan yang timpang mengakibatkan hanya laki-laki yang mempunyai hak waris atas tanah dan perempuan tidak berhak untuk mendapatkan hak waris tersebut. Oleh karena kehidupan perempuan Batak bergantung pada laki-laki atau suami. Perempuan Batak yang menuntut hak mewaris di luar konteks ajaran *Dalihan Na Tolu* akan cenderung memasuki sifat materialistik yang egois individualistik.¹⁷

Misi oleh dan untuk Perempuan dalam Sejarah Perjalanan Gereja HKBP

Misi bagi pendeta perempuan Batak berkaitan dengan kemuliaan

Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan,” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 401–2.

13 Siregar, “Ketidaksetaraan Gender dalam Dalihan na Tolu,” 13–15.

14 H. Wayne House, *The Role of Women in Ministry Today* (Nashville: Thomas Nelson, Inc., 1990), 101.

15 Krister Stendahl, *The Bible and the Role of Women* (Philadelphia: Fortress Press, 1966), 29–30.

16 Irianto, *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum*, 9.

17 H.P. Panggabean, *Pembinaan Nilai-nilai Adat Budaya Batak Dalihan Natolu* (Jakarta: Dian Utama, 2007), 28.

Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misi bagi perempuan Batak mampu menyeimbangkan dirinya dengan bekerja maksimal serta memiliki spiritualitas. Kerja misi bagi pendeta perempuan Batak tidak terjebak dalam stereotip terhadap perbedaan jenis kelamin. Pendeta perempuan Batak harus dilibatkan dalam berbagai peran serta dalam pengambilan keputusan sehingga dapat berkarya. Perempuan Batak harus menggunakan talenta sebagai ladang pengabdian Allah dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Pendeta perempuan Batak dapat melakukan misi kepada jemaat lewat pekabaran injil (*kerygma*) dan melalui pekerjaannya atau perbuatan dalamewartakan kerajaan Allah. Misi harus diwujudkan nyatakan dalam *diakonia*, *koinonia*, serta *marturia*.

Pesan dari kemesiasan Yesus disampaikan kepada orang percaya secara umum adalah seorang pelayan. Dalam memaknai misi (pengutusan), pendeta terkhusus pendeta perempuan Batak adalah *prolongatus Christi* atau disebut perpanjangan dari kehadiran Kristus. Seorang pelayan mampu menjadi *imitation Christi* (menyerupai teladan Kristus) atau *kathos Christi* (seperti Kristus) bagi gereja terutama bagi dunia (2 Kor. 3:18; 1 Yoh. 3:2).¹⁸ Seorang pelayan menjadi pengikut dan meniru jejak pelayanan Yesus yaitu: melayani, mengasihi, dan memberitakan keselamatan kepada dunia. Dalam menjalankan misi, pendeta memiliki tugas yang kudus yaitu pembawa pesan Kristus (2 Kor. 5:20) dan pengganti kehadiran Kristus. Perempuan Batak sebagai pemimpin dapat melakukan kerja misi sehingga menyentuh setiap warga jemaat dalam lintas usia. Kepemimpinan perempuan Batak harus memiliki spiritualitas unggul, kualitas unggul, karakter unggul.

Siagian dalam bukunya "Teologi Sahala," menjelaskan bahwa persoalan karakter dalam budaya Batak Toba identik dengan kata *sahala*. Ada dua faktor yang memengaruhi terbentuknya *sahala* yang merujuk pada karakter: yakni spiritualitas (*spirituality*) dan kualitas (*quality*) yang dimiliki seseorang. Apabila kedua faktor itu terdapat secara kuat dalam diri seseorang, orang itu akan tampil prima sebagai seorang yang berkarakter: *marsahala*. Dengan pekataan lain, makin besar *sahala* seseorang, makin besar pula karakter atau karismanya.¹⁹ Bagaimana kemudian kedua faktor ini diimplementasikan dalam kepemimpinan orang tua di tengah-tengah keluarga, Siagian menjelaskan bahwa kesungguhan melakukan *patik* dan *uhum* yang membuat seseorang memiliki *sahala* yang besar, yang pada gilirannya ia dipandang layak untuk

18 Lumbantobing, *Tumbuh Lokal Berbuah Universal: Revitalisasi Program Pelayanan HKBP Pasca 100 Tahun Dr. Ingwer Ludwig Nommensen*, 368.

19 Riris Johanna Siagian, *Teologi Sahala* (Pematangsiantar: L-SAPIKA, 2021), 63.

menjadi pemimpin.²⁰ Orang tua dalam keluarga Kristen harus memegang teguh pengajaran yang terkandung dalam Alkitab sebagai dasar pengajaran terhadap anak. Dengan demikian, orang tua dapat dikatakan pantas atau layak sebagai pemimpin di tengah keluarga.

Di samping itu, orang tua sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga merujuk pada karakter yang unggul, yang merujuk pada sekumpulan nilai-nilai atau kualitas yang membuat seseorang itu berbeda dari yang lainnya. Dalam pemahaman orang Batak, ada beberapa karakter Batak apabila merujuk pada falsafah Batak, yakni: *mardebata na togu* (bertuhan dengan kuat), *martondi na mangolu* (berspiritualitas), *siula patik dohot uhum* (melakukan hukum dan aturan), *marorot* (mengayomi atau melindungi), *marpanatapan tu jolo* (visioner), *guru panungkunan* (penasehat), *sada hata dohot pangalaho* (satu kata dan tindakan), *sitindangi* (bersaksi), *manangihon sian nasa roha* (mendengar dengan hati), *haposan* (dapat dipercaya), *uli rohana* (tulus hatinya).²¹ Semua karakter di atas harus dimiliki oleh orang tua, secara khusus dalam keluarga Batak, agar mampu memberikan pengajaran rohani yang baik kepada anaknya – karena pengajaran yang baik tidak terlepas dari karakter yang baik pula.

Salah satu contoh tokoh Alkitab yang dapat dikatakan memiliki karakter adalah hakim Debora. Karakter Debora yang dapat diteladani adalah bahwa ia hanya percaya pada Firman Tuhan. Debora mampu mengerti bahwa hanya Tuhan yang mampu melakukan apa yang Dia katakan akan dia lakukan. Misalnya, ketika Tuhan mengatakan bahwa Barak dan Israel akan mengalahkan tentara Kanaan, Debora percaya kepada Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan tidak perlu dikuatkan oleh tanggapan orang lain. Oleh karena itu, ketika Barak bimbang dan mengatakan bahwa dia harus pergi bersamanya atau dia tidak akan pergi, dia tidak goyah atau mulai meragukan kemampuan Tuhan untuk menggenapi Firman-Nya. Namun, Debora menantang Barak karena kurangnya imannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mempercayai Tuhan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, Debora mewakili ciri orang yang berkarakter, yakni *mardebata na togu* (bertuhan dengan kuat), dan tentunya masih banyak lagi teladan sikap Debora.

Berbicara mengenai misi dalam pelayanan kaum perempuan tidak terlepas dengan sejarah berdirinya Gereja HKBP. Gereja HKBP berdiri pada tanggal 7 Oktober 1861. Perkembangan kekristenan semakin pesat di tanah Batak dan salah satu tokoh yang terlibat adalah kedatangan Ludwig Ingwer

²⁰ Siagian, 64.

²¹ Riris Johanna Siagian, *Sahala bagi Pemimpin* (Pematangsiantar: L-SAPIKA, 2019), 60.

Nommensen. Pemberitaan injil dilakukan dengan metode berbicara, diakonia, dan pendidikan sehingga perubahan terjadi di tanah Batak. Metode yang Nommensen gunakan dalam pengembangan agama di tanah Batak adalah melalui buku-buku sejarah dengan tulisan Batak.²² Dalam hal ini, cara berpikir orang Batak berkembang dan tentunya Injil diterima di tengah orang Batak sehingga mendukung berdirinya jemaat dalam Gereja Batak.

Pada awalnya, keterlibatan perempuan dalam pelayanan di tanah Batak tidak lepas dari peran para misionaris. Kehidupan perempuan Batak sebelum kekristenan mengikat dan membatasi ekspresi iman serta aktualisasi diri kaum perempuan terhadap kehidupan masyarakat adat, gereja, berbangsa, dan bertanah air.²³ Hal ini mengalami perubahan yang didorong oleh para misionaris untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan Batak. Selain itu, misionaris juga mengikutsertakan istri di tengah pelayanan seperti mengajar para ibu serta anak-anak. Hal ini juga didukung oleh kehadiran tokoh yang bernama Schwester Hester Needham (1890) yang memulai misi pelayanannya kepada para perempuan. Pelayanan itu tidak mudah dilalui oleh Needham karena pada masa itu nilai-nilai adat dan paham patriarki tidak memperkenankan perempuan untuk memegang jabatan dalam ranah gereja ataupun masyarakat. Misi pelayanan Needham membuka sekolah dan kursus bagi kaum perempuan. Selain itu, tokoh Listte Nieman melakukan pelayanan misinya dengan cara meningkatkan kemampuan fungsional, harkat, dan martabat perempuan Batak.²⁴

Tokoh perempuan yang berperan dalam pelayanan kaum perempuan di tanah Batak ialah Harder. Pada awalnya, Harder melihat kehidupan perempuan Batak yang miskin dan buta huruf sehingga Elfriede Harder melakukan misi pelayanan kepada kaum perempuan lewat pengajaran dalam mengenal huruf, membaca, bernyanyi, mengadakan kursus-kursus untuk menambah wawasan mengenai kehidupan iman Kristen, adat, dan gereja. Dalam hal ini, Harder menekankan pendidikan kepada kaum perempuan terlebih dalam idenya mendirikan Sekolah Penginjil Wanita (Sekolah Bibelvrouw) di Narumonda. Lalu, sekolah penginjilan ini dipindahkan ke Laguboti. Selain sekolah Bibelvrouw, HKBP juga memiliki sekolah perempuan yaitu diakones. Bidang yang ditekuni dalam sekolah diakones adalah dalam bidang diakonia sosial,

22 Bungaran Antonius Simanjuntak, *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 52.

23 Siagian, *Satu Visi Menuju HKBP yang Baru: Penelitian dan Analisa Historis-Kritis, Naratif dari Perspektif Perempuan*, 6.

24 Lumbantobing, *Tumbuh Lokal Berbuah Universal: Revitalisasi Program Pelayanan HKBP Pasca 100 Tahun Dr. Ingwer Ludwig Nommensen*, 468.

perawat kesehatan, keterampilan, dan seni musik dan lainnya. Tahun 1972, HKBP membentuk pelayanan kategorial khusus untuk kaum perempuan yaitu Departemen ina HKBP.

Berbicara mengenai perempuan dalam pendidikan teologia HKBP sudah mengizinkan perempuan menuntut ilmu di Sekolah Teologi Rendah (SThR) Sipoholon tahun 1950-an. Setelah menyelesaikan studi dalam pendidikan, perempuan tidak diberikan surat keputusan kerja. SThr berubah nama menjadi STT HKBP pada tahun 1978 di Pematangsiantar, Sumatera Utara. Terdapat proses yang panjang dalam menerima perempuan menjadi pendeta, hal ini terlihat dari jarak tahun 1950-1986 menjadi awal dalam penerimaan perempuan menjadi pendeta. Keterlambatan HKBP merealisasikan tabhisan pendeta perempuan sangat erat kaitannya dengan tradisi Batak yang patriarkat.²⁵ Sejak tahun 1986 pendeta perempuan semakin bertambah.

Cikal bakal perempuan Batak menjadi pendeta dan pemimpin di tengah gereja adalah tahun 1985 ketika HKBP membuka diri untuk penerimaan pendeta perempuan. 1 orang lulusan STT mengikuti prosedur penerimaan yaitu Noortje Lumbantoruan kemudian diikuti Minaria Saragih Sumbayak; br Marpaung. Kemudian diikuti Minaria dan Marpaung pada tahun berikutnya. Basa Hutabarat menerima penahbisan pada tahun 1987. Kesempatan yang diberikan oleh Pimpinan HKBP kepada pendeta perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan atau program merupakan dorongan bagi pendeta perempuan untuk memperkenalkan eksistensi mereka sebagai pendeta yang sejajar dengan sesama pendeta laki-laki. Menjalin hubungan dengan pendeta perempuan di luar HKBP misalnya GBKP, GKPI, GKPS, HKI, atau BNKP, untuk secara bersama mencari peluang kesetaraan gender. Hubungan oikumenis ini terjalin untuk mempermudah penerimaan kehadiran pendeta perempuan dalam gereja sebagai pendeta resort. Melalui *lobby* kepada Pimpinan atau Ephorus-Sekjen, pendeta perempuan meminta untuk memegang ressort sama seperti pendeta laki-laki.²⁶

Aturan Peraturan HKBP 2002 Setelah Amandemen III mengenai pelayan sebagai pemimpin tidak mempersoalkan bahkan HKBP terbuka untuk memberikan peluang serta berperan aktif dalam melayani di tengah gereja HKBP. Kesempatan menjadi seorang pelayanan atau pemimpin di HKBP, di tingkat *huria* sampai tingkat pusat, selalu terbuka untuk semua pelayan

25 Anna Ch. Vera Pangaribuan, "Pergumulan Pendeta Perempuan di tengah-tengah Gereja HKBP," dalam *Perempuan Bersaksi*, ed. oleh Riris Johanna Siagian dan Raulina Siagian (Pematangsiantar: L-SAPA, 2015), 104.

26 Basa Rohana Hutabarat, "Kepemimpinan Pendeta Perempuan Batak" wawancara oleh Marta Uli Batubara, Pematangsiantar, 21 Nopember 2023, *via Email*.

terkhusus pendeta perempuan.²⁷

Struktur kepemimpinan di HKBP menurut AP HKBP 2020 Amandemen III tidak sepenuhnya mengacu kepada sistem *flat*, mendatar, tetapi masih sistem monolitik.²⁸ Pada pasal 27 mengenai pelayanan Tahbisan di HKBP, pendeta adalah yang menerima jabatan kependetaan dari HKBP melalui Ephorus sesuai dengan agenda HKBP. Jabatan dalam kependetaan ini tercakup sebagai jabatan Kristus yaitu nabi, imam, dan raja. Pelayan tahbisan di HKBP menerima pendeta laki-laki dan perempuan. HKBP tetap memelihara kesetaraan gender baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kesempatan dan peluang dalam melayani dan dilayani, memimpin dan dipimpin di HKBP. Maka dari itu, HKBP menjunjung harkat dan martabat pendeta perempuan dan turut aktif dalam menjalankan tritugas panggilan gereja. Sesuai dengan prinsipnya, HKBP berpegang teguh untuk (a) melayani bukan dilayani, (b) menjadi garam dan terang, (c) menegakkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.

Jabatan pimpinan jemaat adalah pelayanan tahbisan penuh waktu yaitu pendeta, guru jemaat, Bibelvrouw, dan diakones. Sedangkan menjabat pimpinan Resort, Praeses, Ephorus, Sekretaris Jendral, Kepala Departemen Koinonia dan Marturia dari kalangan pendeta. AP HKBP 2002 Amandemen III membuka peluang kepada semua pelayan untuk dapat menjabat suatu jabatan struktural dan tidak ada persyaratan berdasarkan gender. Untuk menjabat posisi pimpinan jemaat dan pendeta Resort tidak ada kriteria khusus. Sedangkan, jabatan Praeses memiliki syarat yaitu menerima 15 tahun tahbisan kependetaan sedangkan tingkat pimpinan usia minimal 20 tahun.

Dalam pelayanan di tengah gereja didorong oleh visi, misi, dan prinsip yang bergerak sebagai arah di tengah-tengah gereja. Menurut pandangan saya, misi HKBP berbicara mengenai kualitas-mutu khususnya perempuan yang ikut berperan aktif di tengah gereja melalui tritugas panggilan gereja. Begitu juga halnya dengan pendeta perempuan diberikan peluang dalam berbagai aspek di tengah-tengah pelayanan dalam memahami dan menyadari panggilannya. Pendeta perempuan dituntun bergerak dalam membangun integritas diri, spiritualitas, dan kemampuan di dalam diri perempuan sehingga dapat mengimplementasikan amanat Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan baik secara pribadi maupun secara luas. Tahun perempuan menjadi sarana dalam pendorong perempuan menjadi pemberitaan firman Tuhan bahwasannya

27 HKBP, *Perempuan dalam Gereja: Perjalanan Panjang Perempuan HKBP* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 4.

28 Darwin Lumbantobing, "Kepemimpinan Partohonan menurut Aturan dan Peraturan HKBP 2002," dalam *Posisi dan Peluang Perempuan Partohonan dalam Pengambilan Keputusan di HKBP*, ed. oleh Nurliani Siregar (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 18.

perempuan mampu mengembangkan potensi diri sebagai pelaku pelayanan dan bangkit menjadi pelopor dalam pekerjaan Tuhan.²⁹

Para misionaris pada abad ke 19 dan 20 dalam misi memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan suku Batak memberi peluang dalam pekerjaan misi kepada kaum perempuan. Akan tetapi, tidak ada menjabat sebagai pendeta perempuan dalam memimpin gerakan misi di tengah gereja ataupun di tengah orang Batak. Oleh sebab itu, setelah kepergian misionaris, para pendeta Batak tidak melibatkan perempuan berperan dalam memimpin. Hal ini juga eratny hubungan dengan adat dan budaya Batak yang patriarkal.

Pada awalnya, perempuan tidak diberikan kesempatan dalam menjabat hal keagamaan seperti imam atau pendeta perempuan. Pada dua dekade terakhir abad ke-20, jabatan (*partohonan*) imam mulai diberikan termasuk oleh Gereja Anglikan dan HKBP yang berakar dalam adat paternalistik yang kokoh.³⁰ Realitasnya, masih ada gereja di Indonesia yang sampai sekarang belum mau menerima perempuan sebagai “pelayan” penuh dalam jemaat.³¹

AP HKBP tahun 2002 setelah amandemen III menegaskan kesetaraan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki di HKBP. Hal ini termasuk juga dalam kesetaraan dalam organ-organ pelayanan. Secara realitasnya, pendeta perempuan masih memiliki kedudukan atau posisi yang dinomorduakan dalam kepemimpinan bahkan beberapa gereja masih dipimpin oleh sintua terutama sintua laki-laki. Dalam pelayanan, pendeta perempuan diberikan peluang atau kesempatan di tengah gereja. Akan tetapi, dalam hal kepemimpinan ataupun dalam hal pengambilan keputusan, hak pendeta perempuan seolah-olah tertutup. Maka dari itu, perjuangan perempuan HKBP dalam posisi atau kedudukan struktur pengambilan keputusan HKBP tertinggi akan sulit seperti dalam ranah Majelis Pekerja Sinode Distrik, Majelis Pekerja Sinode, Praeses, dan kelima pimpinan tertinggi HKBP (Ephorus, Sekretaris jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Marturia dan Diakonia).

Posisi atau kedudukan pendeta perempuan dapat dikatakan masih belum setara hal ini disebabkan bahwasannya HKBP masih terdapat pengelompokan atau mendahulukan kaum laki-laki sebagai pemimpin di HKBP tetapi secara AP HKBP serta dari segi *de jure* peraturan tidak melarang dalam segi dominasi

29 Glorya S.P. Simamora, “Perempuan HKBP dan Tahun Perempuan HKBP 2015,” dalam *Perempuan dalam Gereja: Perjalanan Panjang Perempuan HKBP*, ed. oleh Nurliani Siregar (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 85.

30 K. Tunggul, “Peranan Wanita dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas,” dalam *Dewan Perempuan*, ed. oleh Dewan Wanita (Jakarta: Dewan Wanita, 1994), 73.

31 J.L.Ch. Abineno, *Sekitar Theologia Praktika* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1979), 134.

serta tidak ada larangan perempuan untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah HKBP. Hal ini juga selaras dengan pendapat Pdt. Anna Ch Vera Pangaribuan mengenai posisi kepemimpinan pendeta perempuan di HKBP yang masih terus diperjuangkan dengan serius karena belum sepenuhnya diterima sebagaimana pendeta laki-laki. Berdasarkan AP, tidak ada pembedaan, tetapi secara faktual tidak sedemikian.³²

Secara historis, pelayan pendeta perempuan selalu menjadi proses pergumulan hingga masa kini. Keterlambatan HKBP dalam merealisasikan penahbisan pendeta perempuan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor terkhusus budaya Batak (*patriarki*). Hal ini berkaitan juga dengan kedudukan perempuan terhadap peran domestik sehingga posisi dan peran perempuan Batak tidak memberi ruang untuk berbicara dan tampil sebagai pemimpin. Pergumulan pendeta perempuan di tengah gereja HKBP merupakan pergumulan yang serius di tengah zaman maju. Pendeta perempuan berusaha untuk melayani dengan sebaik-baiknya, akan tetapi pergumulan ataupun tantangan kepemimpinan pendeta perempuan dipengaruhi secara eksternal dan internal sehingga memengaruhi dalam pelayanan di tengah gereja. Tantangan pendeta perempuan berpengaruh terhadap peran dan posisi kepemimpinan mereka di gereja dan keluarga.

Berdasarkan hasil uraian dan penelitian di atas, saya berpendapat bahwa tantangan kepemimpinan pendeta perempuan secara eksternal di tengah HKBP dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:

1. Budaya Patriarki

Budaya Patriarki dikaitkan dengan konstruksi gender yang timpang sehingga menghasilkan pembagian ruang dan peran terhadap perempuan. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang dari kekuasaan ataupun mendominasi dalam peran kepemimpinan. Pandangan tradisional mengenai budaya patriarki berkaitan dengan kondisi biologis sehingga perempuan Batak dianggap lemah, bergantung hanya dengan laki-laki atau suami dan lainnya. Budaya patriarki menyebabkan perempuan terikat dan tidak bebas dalam mengekspresikan diri dan bakat terlebih sebagai pemimpin. Menurut Pdt. Sanggam M.L Siahaan, salah satu pendeta perempuan yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan serta banyak menulis tentang kajian “feminisme”, berpendapat bahwa budaya patriarki ini melihat kelemahan

32 Anna Ch Vera Pangaribuan, “Kepemimpinan Pendeta Perempuan Batak” wawancara oleh Marta Uli Batubara, Pematangsiantar, 18 Nopember 2023, melalui via WhatsApp.

perempuan secara fisik yang menganggap perempuan lemah, berputar pada pekerjaan domestik, tidak cocok menjadi pemimpin dan lainnya.³³

2. Subordinasi terhadap gender

Subordinasi terhadap kepemimpinan perempuan berkaitan dengan ketidakseimbangan atau ketimpangan kedudukan ataupun peran. Subordinasi terhadap kepemimpinan pendeta perempuan menganggap kepemimpinan pendeta laki-laki lebih unggul daripada pendeta perempuan. Pendeta perempuan dianggap sebagai objek baik secara otoritatif, kontrol kepemimpinan maupun pengambilan keputusan. Subordinasi gender ini menyebabkan ketimpangan antara peran pendeta laki-laki dan pendeta perempuan dalam mengambil keputusan. Adat dan budaya Batak memengaruhi posisi kepemimpinan perempuan, baik dalam struktur *Dalihan Na Tolu*, hak waris, dan lainnya. Kepemimpinan pendeta perempuan kurang terlibat dalam mengambil keputusan, transformasi gereja maupun jemaat. Menurut Pdt. Basa Rohana Hutabarat, kuantitas jumlah pendeta perempuan di HKBP tidak seimbang dengan penempatan yang strategis sebab tidak banyak perempuan Pendeta yang memimpin ressort, distrik, dan institusi atau lembaga.

Di samping dua faktor di atas, ada empat faktor secara umum yang menyebabkan pendeta perempuan sulit untuk diterima di tengah-tengah HKBP:

1. Sesama pendeta perempuan kurang memberikan rasa hormat terhadap pendeta perempuan;
2. Pendeta perempuan kurang membangun relasi yang kuat dengan pendeta laki-laki, karena pendeta perempuan masih dianggap sebagai saingan oleh pendeta laki-laki (sebagai pengaruh dari kebudayaan patriarkal);
3. Pendapat pendeta perempuan kurang didengar di *parhalado* atau *sintua*;
4. Jemaat ada yang masih tidak siap menerima pendeta perempuan akibat stereotip yang diberikan pada perempuan sebagai "makhluk lemah" dan oleh karena itu lebih memilih pendeta laki-laki.³⁴

Dengan demikian, wawasan yang sempit memengaruhi cara pandang atau pikir perempuan pemimpin. Sebagai pemimpin, pendeta seharusnya dapat mewarnai pemikiran orang-orang yang dipimpinnya. Wawasan juga

33 Sanggam M.L Siahaan, "Kepemimpinan Pendeta Perempuan Batak" wawancara oleh Marta Uli Batubara, Pematangsiantar, 19 Nopember 2023, melalui tatap muka.

34 Anna Ch Vera Pangaribuan, "Kepemimpinan Pendeta Perempuan Batak" wawancara oleh Marta Uli Batubara, Pematangsiantar, 18 Nopember 2023, melalui via *WhatsApp*.

memengaruhi pemimpin dalam mengambil keputusan yang tegas dan akurat. Kebiasaan perempuan untuk berbagi “cerita” kepada temannya adalah hal yang harus diperhatikan dengan serius dalam kepemimpinannya. Membangun komunikasi yang intens adalah hal yang baik, namun tetap menjaga wibawa kepemimpinan. Di samping itu, emosi yang terkontrol dapat membangun kepribadian seorang pemimpin dan sebaliknya emosi yang tidak terkontrol dapat merusak kepribadian seorang pemimpin. Dengan menjaga emosi, pemimpin perempuan dapat menahan air mata yang kerap dianggap sebagai “kecengengan” atau kata yang kasar yang seharusnya tidak perlu diperdengarkan di depan jemaat.

Upaya Mewujudkan Misi Praksis terhadap Pendeta Perempuan di tengah Gereja

Berbicara mengenai misi praksis tentu berhubungan dengan nilai-nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata sehingga terdapat upaya maupun nilai praktik dalam mewujudkan pelayanan pendeta perempuan. Dalam mewujudkan pelayanan, pendeta perempuan harus memiliki spiritualitas dalam diri, karakter pemimpin yang berkualitas, memiliki potensi, dan karakter seperti Kristus. Selain itu pendeta perempuan harus bisa mencapai peluang dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peluang berpengaruh besar bagi kedudukan maupun pengembangan diri pendeta perempuan. Pelayanan pendeta perempuan harus dapat berperan di tingkat resort, distrik, dan jemaat. Pelayanan pendeta perempuan juga harus nyata dalam tritugas panggilan gereja yaitu *koinonia*, *marturia*, dan *diakonia* secara efektif.

Upaya yang dapat dilakukan untuk membuka wawasan dan kacamata dalam perspektif perempuan adalah

1. Mengadakan dan mewujudkan program dalam pendidikan dan *training* dalam kesadaran serta sensitivitas gender untuk semua anggota komunitas Gereja baik terhadap *partohonan* maupun kepada warga jemaat kaum laki-laki, perempuan, tua, muda, dan anak-anak;
2. Adanya program dalam menyosialisasi cara membaca Alkitab dengan mata baru kepada anggota komunitas yaitu membaca dengan perspektif perempuan;
3. Perlunya pendidikan serta pelatihan kepada perempuan dalam kepemimpinan dan keterampilan manajemen sehingga pendeta perempuan memiliki keterampilan dan kemampuan yang berkualitas;
4. Berpikir secara kritis dan membuka pendapat mengenai tuntutan dalam perubahan AP HKBP dalam aspek kehidupan;

5. Memberikan peluang kepada pendeta perempuan yang berkaitan dengan posisi pengambilan keputusan di semua jenjang;
6. Memperjuangkan serta berperan dalam keikutsertaan terhadap hak-hak perempuan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan RI;
7. Menyosialisasikan, mengkomunikasikan, serta melaksanakan keputusan-keputusan yang telah disepakati Badan-badan Ekumenis Dunia yang menyangkut mengenai partisipasi perempuan dalam gereja.³⁵

Pada tanggal 2/12/2021 HKBP melakukan seminar dengan topik pemberdayaan perempuan *partohonan* HKBP di Kantor Pusat Pearaja Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara bahwasannya dalam seminar tersebut merekomendasikan 4 poin penting yaitu:

1. Perempuan *partohonan* HKBP harus mampu mengubah paradigma dalam pelayanan di era digital dan masa pandemi Covid-19;
2. Perempuan *Partohonan* HKBP ikut berperan aktif dalam pelayanan kesehatan HKBP dengan menumbuhkan kebersamaan dan kolaborasi antar sesama pelayan dan pemangku tugas di HKBP;
3. Perempuan *partohonan* HKBP di era digital atau era teknologi 4.0 harus memiliki karakter kepemimpinan yang unggul dengan menerapkan model kepemimpinan yang melayani bukan menguasai;
4. Mendukung pelunasan hutang HKBP ke dana pensiun sebesar 5.000/perempuan hanya sekali saja.³⁶

Pendeta perempuan harus memiliki modal di dalam dirinya melalui spiritualitas serta meningkatkan integritas diri. Pendeta perempuan dituntut untuk lebih aktif dalam mengasah kemampuannya sehingga perlu adanya dorongan dan kesempatan dalam pembinaan, rapat dan pengambilan keputusan. Pendeta perempuan dapat mempersiapkan diri dalam memberikan distribusi pokok-pokok pikiran. Pendeta perempuan dapat berperan melalui kualitas kemampuan diri baik dalam tantangan serta ancaman di tengah-tengah Gereja. Kepemimpinan pendeta merujuk kepada keteladanan dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan dan pelayanannya di tengah-tengah gereja.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pelayanan misi praksis terhadap pendeta perempuan harus dimulai dari kampus STT HKBP.

35 Lydia Siahaan, "Tantangan Perempuan dalam Posisi Pengambilan Keputusan di Gereja HKBP," dalam *Posisi dan Peluang Perempuan Partohonan*, ed. oleh Nurliani Siregar (Riau: Forum Perempuan Partohonan HKBP, 2008), 59.

36 "Pemberdayaan Perempuan *Partohonan* HKBP" Biro Informasi HKBP, diakses pada 13 Agustus, 2023, pukul 20.35 <https://www.hkbp.or.id/article/seminar-pemberdayaan-perempuan-partohonan-hkbp-kerja-sama-dengan-uem-hasilkan-4-rekomendasi>

Mahasiswa dan mahasiswi harus mendapatkan pengajaran mata kuliah berbasis gender, seperti mata kuliah Studi Gender misalnya, yang memampukan mereka untuk membuka wawasan akan kesetaraan dalam bidang pelayanan yang akan mereka tempuh nantinya. Mengenai budaya patriarki tentu tidak dapat diubah akan tetapi dapat berubah wujud dalam perkembangannya karena budaya itu hasil dari pikiran manusia. Ketika pemikiran manusia berubah maka tentu penerapan budayanya juga berubah sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, pendeta perempuan pun sudah dapat memberikan berkat, sudah banyak pendeta perempuan yang menempuh pendidikan yang tinggi (studi lanjut), dan saat ini sudah ada tiga (3) orang pendeta perempuan yang menjabat sebagai pemimpin di tingkat distrik (praeses) HKBP.

Berdasarkan uraian di atas, upaya yang dapat dilakukan oleh para pendeta perempuan Batak dalam menjalankan kepemimpinan di tengah pelayanan gereja tentu tidak hanya berpusat di mimbar saja. Mereka perlu juga bertindak dalam pelayanan tritugas panggilan gereja *koinonia*, *marturia*, atau *diakonia* dalam menyentuh lapisan warga jemaat, mengingat pendeta perempuan dapat menyentuh sampai lapisan yang paling bawah. Misalnya, pendeta perempuan harus bisa menjadi *haposan* (kepercayaan) di masing-masing kategorial, baik itu anak sekolah minggu, remaja, ama, ina, maupun lansia. Kepercayaan tiap-tiap kategorial terhadap pendeta perempuan nantinya akan menjadi *support* yang sangat besar bagi dalam meningkatkan mutu pelayanan di gereja.

Kesimpulan

Secara historis, upaya mencapai kesetaraan perempuan Batak memerlukan waktu yang cukup lama bahkan akan selalu berproses. Hal ini terjadi karena adat istiadat suku Batak yang sifatnya mengikat aktivitas perempuan Batak. Budaya Batak sangat kental akan patriarki sehingga mendominasi kepada laki-laki sementara perempuan selalu di nomor duakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam sudut pandang pekerjaan gender laki-laki tampil dalam ruang publik sedangkan perempuan tampil dalam bidang domestik. Sebelum masuknya misi terhadap orang Batak, perempuan sangat tertinggal dalam pendidikan dan injil akan tetapi setelah misionaris menjalankan misi di tengah-tengah orang Batak maka terjadi perkembangan pada perempuan Batak.

HKBP telah membuka peluang kedudukan bagi perempuan untuk menjadi pendeta di tengah-tengah gereja, hal ini juga didukung oleh AP HKBP 2002 amandemen III. Realitasnya, masih terdapat beberapa tindakan diskriminasi terhadap pendeta perempuan baik secara struktural, pimpinan, dan warga jemaat yang melihat secara pribadi bukan secara *tohonan*. Berbicara

mengenai kedudukan dan posisi pendeta perempuan dalam hal memimpin dan mengambil keputusan masih didominasi oleh laki-laki maka dari itu pendeta perempuan harus diberikan peluang dan kesempatan sehingga misi bisa tercapai jika perempuan bisa menggapai peluang.

Misi bagi pendeta perempuan Batak berkaitan dengan kemuliaan Allah. Pendeta perempuan Batak harus menggunakan talenta sebagai ladang pengabdian Allah dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Pendeta perempuan Batak dapat melakukan misi kepada jemaat lewat pekabaran injil (*kerygma*) dan melalui pekerjaannya atau perbuatan dalamewartakan kerajaan Allah. Misi harus diwujudkan nyatakan dalam diakonia, koinonia, serta marturia. Kepemimpinan pendeta perempuan dalam sudut pandang misi memaknai sebagai perpanjangan dari kehadiran Kristus dan teladan Kristus. Kepemimpinan pendeta perempuan Batak juga berkaitan dengan kepemimpinan gereja yang mencakup dalam amanat agung. Misi pendeta perempuan adalah membina dan mengarahkan jemaat dalam kedewasaan iman kepada Kristus bagi seluruh jemaat. Yesus Kristus merupakan sosok teladan bagi pemimpin yang bertanggung jawab untuk pengembalaan kepada jemaat serta mengabarkan firman Allah di tengah gereja. Sikap seorang pemimpin adalah mendidik dan memelihara tugas panggilannya dengan setia. Pendeta perempuan harus memiliki spiritualitas dan memiliki karakter seperti Kristus sehingga siap melayani. Pendeta perempuan meningkatkan intelektualitas serta membangun jaringan maupun relasi yang luas.

Daftar Pustaka

- Abineno, J.L.Ch. *Sekitar Theologia Praktika*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1979.
- Cohick, Lynn H. "Prophecy, Women in Leadership and the Body of Christ." Dalam *Women, Ministry, and the Gospel: Exploring New Paradigms*, disunting oleh Mark Husbards dan Timothy Larsen. Illinois: InterVarsity Press, 2007.
- Djawa, Jerda. "Perjuangan Perempuan di tengah Budaya Patriarki dalam Perjanjian Lama." Dalam *Ketika Perempuan Berteologi*, disunting oleh Asnath Niwa Natar. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2012.
- Firmando, Harisan Boni. *Sosiologi Kebudayaan dari Nilai Budaya hingga Praktik Sosial*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- HKBP. *Perempuan dalam Gereja: Perjalanan Panjang Perempuan HKBP*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- House, H. Wayne. *The Role of Women in Ministry Today*. Nashville: Thomas Nelson, Inc., 1990.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Lumbantobing, Darwin. "Kepemimpinan Partohonan menurut Aturan dan

- Peraturan HKBP 2002." Dalam *Posisi dan Peluang Perempuan Partohonan dalam Pengambilan Keputusan di HKBP*, disunting oleh Nurliani Siregar. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- . *Tumbuh Lokal Berbuah Universal: Revitalisasi Program Pelayanan HKBP Pasca 100 Tahun Dr. Ingwer Ludwig Nommensen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Ortner, Sherry. "Is Nature to Culture as Female is to Male?" Dalam *Woman, Culture, and Society*, disunting oleh Michelle Rosaldo dan Louise Lamphere. Stanford: Stanford University Press, 1974.
- Pangaribuan, Anna Ch. Vera. "Pergumulan Pendeta Perempuan di tengah-tengah Gereja HKBP." Dalam *Perempuan Bersaksi*, disunting oleh Riris Johanna Siagian dan Raulina Siagian. Pematangsiantar: L-SAPA, 2015.
- Panggabean, H.P. *Pembinaan Nilai-nilai Adat Budaya Batak Dalihan Natolu*. Jakarta: Dian Utama, 2007.
- Sari, Elizabeth Nela, Muhammad Yamin, dan Edy Ikhsan. "Peran Dalihan Natolu dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat untuk Pengadaan Kepentingan Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 393–416.
- Siagian, Riris Johanna. *Sahala bagi Pemimpin*. Pematangsiantar: L-SAPIKA, 2019.
- . "Sahala Kepemimpinan Perempuan dalam Konteks Masyarakat Batak dan Alkitab." *VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 1 (2019): 122–40.
- . *Satu Visi Menuju HKBP yang Baru: Penelitian dan Analisa Historis-Kritis, Naratif dari Perspektif Perempuan*. Pematangsiantar: Percetakan HKBP, 2001.
- . *Teologi Sahala*. Pematangsiantar: L-SAPIKA, 2021.
- Siahaan, Lydia. "Tantangan Perempuan dalam Posisi Pengambilan Keputusan di Gereja HKBP." Dalam *Posisi dan Peluang Perempuan Partohonan*, disunting oleh Nurliani Siregar. Riau: Forum Perempuan Partohonan HKBP, 2008.
- Simamora, Gloriosa S.P. "Perempuan HKBP dan Tahun Perempuan HKBP 2015." Dalam *Perempuan dalam Gereja: Perjalanan Panjang Perempuan HKBP*, disunting oleh Nurliani Siregar. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Siregar, Mangihut. "Ketidaksetaraan Gender dalam Dalihan na Tolu." *An1mage: Jurnal Studi Kultural* 3, no. 1 (2018).
- Stendahl, Krister. *The Bible and the Role of Women*. Philadelphia: Fortress Press, 1966.
- Tunggul, K. "Peranan Wanita dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas." Dalam *Dewan Perempuan*, disunting oleh Dewan Wanita. Jakarta: Dewan Wanita, 1994.
- Yessy. *Perempuan Kristiani Indonesia Berteologi dalam Konteks*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.